AKURASI Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan
p-ISSN : 2720-9067
e-ISSN : 2685-1059
Program Studi Magister Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mataram

MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN *RISK DISCLOSURES*: STUDI PADA *ANNUAL REPORT* BANK DEVISA DI INDONESIA

Nina Febriana Dosinta
Universitas Tanjungpura, *Indonesia*
Corresponding author: nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id https://orcid.org/0000-0002-0549-9379

INFORMASI ARTIKEL

Article history:
Dikirim tanggal: 05/11/2021
Revisi pertama tanggal: 23/11/2021
Diterima tanggal: 06/12/2021
Tersedia online tanggal 27/12/2021

ABSTRAK

Otoritas Jasa Keuangan telah menyusun Roadmap Keuangan Berkelanjutan dalam jangka panjang 2020-2024 yang menekankan pada integrasi risk management, corporate governance, penilaian tingkat kesehatan bank dan keuangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh mekanisme corporate governance terhadap risk disclosures pada 11 bank devisa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam era Roadmap Keuangan Berkelanjutan dengan menggunakan analisis regresi berganda data panel Generalized Least Square. Metode content analysis digunakan pada annual report periode 2015-2020 untuk menilai risk disclosures. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, dan frekuensi rapat komite audit sebagai proksi dari mekanisme corporate governance berpengaruh signifikan terhadap risk disclosures. Temuan penelitian ini mengimplikasikan bahwa hadirnya struktur pengawasan dalam suatu perusahaan berperan penting dalam mendeteksi risk disclosures.

Kata Kunci: risk disclosures, annual report, corporate governance

ABSTRACT

The Financial Services Authority has compiled a Sustainable Finance Roadmap for the long term 2020-2024, which emphasizes the integration of risk management, corporate governance, assessment of bank rating, and sustainable finance. This study examines the effect of corporate governance mechanisms on risk disclosures at 11 foreign exchange banks listed on the Indonesia Stock Exchange in the Sustainable Finance Roadmap Era using multiple regression analysis of Generalized Least Square panel data. The content analysis method is used in the 2015-2020 annual report to assess risk disclosure. The study results reveal that the frequency of board of commissioners meetings, the size of the audit committee, and the frequency of audit committee meetings as a proxy for corporate governance mechanisms significantly affect risk disclosure. The findings of this study imply that the presence of a supervisory structure in a company plays an important role in detecting risk disclosures.

Keywords: risk disclosures, annual report, corporate governance

1. Pendahuluan

Sektor perbankan merupakan sektor terpenting yang harus mampu mendeteksi *risk disclosures* dalam pelaporan perusahaan, karena perusahaan perbankan memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan non perbankan. Hal ini karena bank memiliki struktur *corporate governance* yang berbeda dengan perusahaan non keuangan, bank memiliki tingkat *leverage* yang sangat tinggi dibandingkan non keuangan, bank beroperasi dengan tingkat ketidakpastian informasi yang lebih tinggi daripada perusahaan lain, serta bank termasuk dalam '*highly regulated*' (Lobo, 2017). Pelaporan kegiatan ekonomi dalam suatu perusahaan harus memiliki kejelasan dan memberikan informasi penting yang dapat mengkomunikasikan kemungkinan suatu konsekuensi dari kegiatan bisnis dan ketidakpastian untuk memfasilitasi pengambilan keputusan (Wahh et al., 2020), sehingga *risk disclosures* yang merupakan bagian dari *annual report* perusahaan (Miihkinen, 2012; Muslih & Mulyaningtyas, 2019) berperan penting dalam pelaporan perusahaan termasuk pada perbankan.

Studi Sabbaghi (2016) di China menyatakan bahwa memahami *corporate governance* sama pentingnya dengan memahami peran etika bisnis terkait integritas dan keberlanjutan jangka panjang serta memastikan bahwa aset perusahaan dapat digunakan secara efisien dan produktif. *Corporate governance* terkait erat dengan peran pengawasan perusahaan guna bekerja secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang dan keberlanjutan perusahaan dalam memenuhi kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* guna pembuatan keputusan (Miihkinen, 2012). Dewan komisaris, komisaris independen, dan komite audit merupakan bagian dari mekanisme *corporate governance* yang berada dalam struktur pengawasan pada suatu perusahaan (Ditta & Setiawan, 2019). Peran mekanisme *corporate governance* dapat meminimalisir terjadinya asimetri informasi dalam pelaporan perusahaan (Rahayuni et al., 2018) dan dapat menekankan pentingnya *risk disclosures* dalam pelaporan perusahaan (Sari & Sholihkah, 2019).

Mekanisme *corporate governance* diterapkan untuk mengendalikan masalah *agency,* karena dalam perspektif teori *agency*, terdapat hubungan yang saling melengkapi ketika penerapan mekanisme *corporate governance*, yakni memperkuat pengawasan internal dan meminimalkan kemungkinan bagi manajer dalam menahan informasi untuk kepentingan sendiri (Vishny & Shleifer, 1997). Hal ini mengarah ke pendeteksian *disclosures* khususnya yang bersifat ketidakpastian dalam *annual report*. Frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit merupakan bagian pengawasan internal perusahaan (Egbunike et al., 2021), yang diharapkan dapat mendeteksi lebih awal suatu ketidakpastian seperti risiko dalam suatu perusahaan.

Selama 20 tahun terakhir, mayoritas studi mengeksplorasi *risk reporting* pada perusahaan non keuangan (Elshandidy et al., 2018). Berdasarkan studi pada akuntansi dan keuangan, terdapat hasil yang beragam berkenaan mekanisme *corporate governance* dengan *risk disclosures*. Penelitian Achmad (2012) mengungkapkan bahwa pada perusahaan-perusahaan keuangan dan non keuangan yang listing di BEI menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk disclosures*. Komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap *risk disclosures* pada perusahaan non-keuangan yang listing di Arab Saudi (Ibrahim et al., 2019), sedangkan pada perusahaan non-keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) mengindikasikan bahwa keefektifan *risk*

disclosures belum sepenuhnya tercermin dari efektifitas karakteristik komisaris independen dan komite audit (Falendro et al., 2018). Dalam konteks pengawasan internal perusahaan yang dilakukan dewan komisaris dan komite audit pada *annual report* perusahaan perbankan yang listing di Bursa Efek 2007-2009, penelitian yang dilakukan Suharjanto et al (2012) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk disclosures*, sedangkan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap *risk disclosures*.

Dalam konteks regulator, studi Buckby et al. (2017) menunjukkan bahwa *risk discosures* yang terdapat pada pelaporan perusahaan di Australia masih belum memenuhi tujuan regulator dan kebutuhan *stakeholders*. Asimetri informasi yang dimungkinkan terjadi pada suatu perusahaan serta sudah berlangsung lama menjadi perhatian regulator (Neri et al., 2018). Regulator di Indonesia telah mengatur pentingnya *risk disclosures* dalam pelaporan perusahaan, diantaranya yang terlihat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (IAI, 2018). Begitu juga dengan *International Financial Reporting Standard* (IFRS), melalui sebagian besar kajian penelitian yang telah dilakukan di beberapa negara mensyaratkan *risk disclosures* yang bersifat wajib (*mandatory*) (Ntim et al., 2013). Selain dari IAI dan IFRS, pentingnya *risk disclosures* dalam perbankan diatur Otoritas Jasa Keuangan (2016).

Otoritas Jasa Keuangan (2014) telah menyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan dalam jangka menengah pada tahun 2015-2019, menekankan pada penguatan keuangan berkelanjutan yang difokuskan pada kerangka dasar pengaturan dan sistem pelaporan. Selain jangka menengah, Otoritas Jasa Keuangan (2014) menyusun dalam jangka panjang pada tahun 2020-2024, menekankan kegiatan yang difokuskan pada integrasi *risk management*, *corporate governance*, penilaian tingkat kesehatan bank dan keuangan berkelanjutan. Dengan adanya Roadmap Keuangan Berkelanjutan, diharapkan semua perusahaan dalam sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2015) termasuk bank devisa dapat menekankan pada penguatan keuangan berkelanjutan. Bank devisa berperan tidak hanya menghimpun dana masyarakat, namun memiliki banyak peranan dalam lalu lintas pembayaran, sehingga bank devisa memberikan jasa lebih kepada nasabah (IDX Channel, 2021). Oleh karena itu, penelitian empiris ini perlu dilakukan untuk menginvestigasi dengan mempertimbangkan pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, rapat dewan komisaris, komite audit, dan rapat komite audit terhadap *risk disclosures* pada bank devisa dengan periode 2015-2020. Studi ini penting dilakukan, mengingat pentingnya pengawasan *corporate governance* dengan pendeteksian *risk disclosures* melalui *annual report* di era keuangan berkelanjutan. Haisl penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur *risk disclosures* berkenaan pendeteksian mekanisme *corporate governance* terhadap *risk disclosures* pada *annual report* bank devisa di era keuangan berkelanjutan serta alternatif dalam pengambilan keputusan bagi bank yang listing di BEI.

2. Kerangka Teoretis Dan Pengembangan Hipotesis

Teori *agency* yang cenderung digunakan sebagai landasan teoretis dalam kajian penelitian terdahulu khususnya berkenaan dengan *corporate governance* menunjukkan pentingnya aspek pengawasan dalam suatu perusahaan (Andarini & Januarti, 2012). Dalam

kerangka teori *agency*, sebagaimana dijelaskan Jensen & Meckling (1976), *agency cost* muncul karena adanya asimetri informasi antara *shareholders* dan manajer, atau antara *shareholders* yang memiliki *controlling interest* dibandingkan dengan *minority interest*. Konflik *agency* yang sering yang terjadi di Indonesia antara *majority shareholders* dan *minority shareholders*, karena *majority shareholders* mengawasi kinerja manajer yang meminta manajer untuk membuat keputusan yang menguntungkan *majority shareholders* (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Oleh karena itu, *risk disclosures* dalam pelaporan perusahaan dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi (Botosan, 1997).

Berdasarkan *Agency Theory*, fungsi pengawasan dewan komisaris untuk memastikan bahwa pengelolaan korporasi sesuai dengan kepentingan *shareholders* (Jensen & Meckling, 1976). Dewan komisaris memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja operasional pada perusahaan perbankan, melalui Peraturan Bank Indonesia mensyaratkan untuk dewan komisaris harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang operasi, *risk management* dan *Good Corporate Governance* (Lutfi et al., 2014). Jumlah dewan komisaris yang besar diharapkan dapat meningkatkan *risk disclosures* (Suhardjanto & Dewi, 2011). Dengan demikian dapat diargumentasikan bahwa komisaris berperan penting dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dalam pendeteksian *risk disclosures* sehingga dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:
H_1: Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *risk disclosures*.

Dewan komisaris independen dapat mengarahkan pada pengeluaran *agency cost* yang lebih sedikit dan menurunkan *risk* (Eisenhardt, 1989). Semakin besar komposisi komisaris independen diharapkan dapat memperhatikan *risk* yang akan dihadapi perusahaan (Istorini & Handoyo, 2014), meningkatkan efektivitas peran pengendalian sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelaporan akuntansi dan meningkatkan *risk disclosures* (Fama & Jensen, 1983). Komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, manajerial, kepemilikan saham, keluarga, komisaris lainnya, *board* dan *shareholders* yang memiliki pengendalian, serta hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Zulfikar et al., 2017). Dengan demikian dapat diargumentasikan bahwa melalui pengawasan komisaris independen akan berperan penting dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dalam pendeteksian *risk disclosures* sehingga dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:
H_2: Ukuran komisaris independen memiliki pengaruh terhadap *risk disclosures*.

Peran dewan pengawas perusahaan menjadi semakin penting ketika terlihat kepentingan *shareholders* yang terancam (Jensen, 1993). Studi Bennet (2013) menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pengawasan melalui frekuensi rapat dewan komisaris, sehingga meminimalkan pengambilan keputusan dengan risiko yang lebih rendah. Pendeteksian risiko yang mungkin terjadi pada perusahaan dapat diantisipasi dengan semakin meningkatnya frekuensi rapat dewan komisaris, karena semakin beragamnya pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Studi Suhardjanto et al. (2012), membuktikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk disclosure*. Melalui pengawasan dengan frekuensi rapat dewan komisaris akan berperan

penting dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dalam pendeteksian *risk disclosures* sehingga dirumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut:
H_3: Frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap *risk disclosures*.

Perusahaan-perusahaan di negara berkembang dapat menggunakan komite audit sebagai mekanisme pengawasan untuk meringankan masalah *agency* (Zhou et al., 2018). Komite audit merupakan salah satu pilar utama dalam mekanisme *corporate governance* dengan berperan pada pemantauan dan pengendalian yang efektif, serta dapat menjamin integritas pelaporan keuangan (Barakat & Hussainey, 2013; Fama & Jensen, 1983). *Risk disclosures* yang terdapat dalam pelaporan perusahaan merupakan hal yang sangat berperan penting dalam mekanisme *corporate governance* (Solomon et al., 2000). Dapat diargumentasikan bahwa pengawasan komite audit akan berperan penting dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dalam pendeteksian *risk disclosures,* sehingga dirumuskan hipotesis keempat sebagai berikut:
H_4: Ukuran komite audit memiliki pengaruh terhadap *risk disclosures*.

Dalam kerangka *agency theory*, pengawasan pada aktivitas perusahaan yang lebih intensif meminimalkan terjadinya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976), sehingga dapat mengantisipasi terjadinya *fraud*. Komite audit sangat penting untuk mengantisipasi *fraud* pada *annual report* (Klein, 2002). Selain itu, komite audit aktif mampu melaksanakan *corporate governance* dengan pemantauan secara lebih efektif dan bertanggung jawab (Collier & Gregory, 1999). Lebih lanjut, Menon & Williams (1994) berpendapat bahwa tidak mungkin untuk memantau manajemen secara efektif jika komite audit tidak aktif. Beasley et al. (2000) menemukan bahwa intensitas rapat komite audit yang jarang, berdampak terdapat banyak kesalahan dalam pengawasan *annual report*. Frekuensi rapat komite audit diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengendalian dan transparansi informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan. Intensitas rapat komite audit yang lebih banyak, diharapkan dapat terdeteksi lebih awal *risk disclosures*. Dengan demikian frekuensi rapat komite audit akan berperan penting dalam mengawasi komitmen bank terhadap aktivitas dan pendeteksian *risk disclosures* sehingga dirumuskan hipotesis kelima sebagai berikut:
H_5: Frekuensi rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap *risk disclosures*.

3. Metode Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank devisa di Indonesia yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan periode 2020. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria-kriteria dalam pemilihan sampel adalah sebagai berikut: (1) bank di Indonesia yang menyediakan devisa sampai dengan tahun 2020; (2) bank devisa yang telah mempublikasikan lengkap laporan tahunan 2015-2020. Berdasarkan kriteria-kriteria tersebut, maka diperoleh jumlah observasi sebanyak 66 bank devisa (6 x 11 jumlah bank devisa). Adapun nama bank devisa berdasarkan IDX Channel (2021) yakni: Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Central Asia, Bank Bukopin, Bank Danamon, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Mega,

Bank OCBC NISP, dan Bank Permata. Statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan software eviews digunakan untuk menguji hipotesis, koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

Penelitian ini mengukur *risk disclosures* sebagai variabel dependen dengan menggunakan *content analysis*. Indeks yang digunakan mengacu pada *Risk Disclosure Index (RDI)* terdiri dari 34 item yang dikembangkan Probohudono et al. (2013a, 2013b). Penelitian ini menggunakan rasio untuk mengukur tingkat pengungkapan *Risk Disclosure Index* (RDI) yaitu jumlah pengungkapan dibagi dengan jumlah maksimal pengungkapan, merujuk pada penelitian Setiawan & Andriyanto (2019). Perusahaan akan mendapatkan nilai 1 apabila mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan *risk disclosure*, sedangkan tidak mendapatkan nilai atau 0 apabila tidak mengungkapkan informasi yang terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Risk Disclosures*

1.	Mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko signifikan
2.	Prospek masa depan
3.	Efek akuisisi
4.	Efek pembuangan
5.	Dampak strategi
6.	Kebijakan keselamatan
7.	Proyek modal berkomitmen
8.	Pengeluaran berkomitmen untuk proyek modal
9.	Dampak strategi di masa depan
10.	Keamanan produk
11.	Data kecelakaan
12.	Biaya tindakan keamanan
13.	Faktor eksternal tertentu yang mempengaruhi prospek perusahaan
14.	Risiko dan peluang akibat perubahan iklim
15.	Pembangunan ekonomi regional utama
16.	Program pengendalian risiko terkait penyakit serius
17.	Risiko pekerja anak, dan penghapusan pekerja anak
18.	Risiko kebebasan berserikat
19.	Insiden kerja paksa atau wajib kerja
20.	Risiko terkait korupsi
21.	Pengendalian internal dan sejauh mana risiko dapat diterima
22.	Risiko *Generally Accepted Accounting Principle* (GAAP) dari entitas tujuan khusus
23.	Dampak perubahan kebijakan akuntansi
24.	Pengendalian internal, pertimbangan termasuk kemungkinan risiko
25.	Pengendalian internal dan dampak risiko yang terwujud
26.	Nilai tukar utama yang digunakan dalam akun
27.	Pengaruh inflasi pada hasil – kualitatif
28.	Pengaruh inflasi pada hasil – kuantitatif
29.	Laporan keuangan yang disesuaikan dengan inflasi tambahan
30.	Pengaruh inflasi pada operasi masa depan – kualitatif
31.	Pengaruh inflasi pada aset – kualitatif
32.	Pengaruh inflasi pada aset – kuantitatif
33.	Menyediakan bisnis kredit konsumen
34.	Perpanjangan kredit

Sumber: Probohudono et al. (2013a, 2013b).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mendeskripsikan *risk disclosures* pada bank devisa serta menguji determinan mekanisme *corporate governance,* yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Dengan demikian variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran dewan komisaris, ukuran komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Berkenaan jumlah variabel independen lebih dari satu, maka data dianalisis dengan menggunakan regresi linear berganda (Chandrarin, 2017), dengan model penelitian sebagai berikut:

$$RDI_{i,t} = \alpha_0 + \beta_1 KOM_{i,t} + \beta_2 KOMIND_{i,t} + \beta_3 RKOM_{i,t} + \beta_4 KAU_{i,t} \beta_5 RKAU_{i,t} + e_{i,t}$$

Keterangan:
RDI = *Risk Disclosures Index*
KOM = Ukuran Komisaris
KOMIND = Ukuran Komisaris Independen
RKOM = Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
KAU = Ukuran Komite Audit
RKAU = Frekuensi Rapat Komite Audit

4. Hasil dan Pembahasan

Proses analisis melalui *Econometrics Views* (Eviews) menunjukkan bahwa Random Effect Model (REM) adalah metode terbaik untuk digunakan dalam studi penelitian ini. Hasil estimasi regresi data panel *Generalized Least Square* didapatkan setelah melalui pengujian Chow-test <0,05 dan Hausman-test dengan nilai probabilitas <0,05 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Chow-test, Hausman-test, dan LM-test

Jenis Pengujian	**Ringkasan Pengujian**		
Chow-test	Statistic 8.445181	d.f. (10,50)	Prob. 0.0000
Hausman-test	Chi-Sq. Statistic 16.798079	Chi-Sq. d.f. 5	Prob. 0.0049

Pada Tabel 3 disajikan hasil statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Mean (nilai rata-rata) 46,77% yang ditunjukkan pada Tabel 3 untuk *risk disclosures* pada era roadmap keuangan berkelanjutan. Nilai 46,77% lebih tinggi pada bank devisa dibandingkan dengan data *risk disclosure* 45,127% pada penawaran perdana yang ditemukan pada studi Setiawan & Andriyanto (2019). Nilai rata-rata 46,77% juga lebih tinggi dibandingkan pada penelitian Probohudono et al. (2013a) senilai 28,61% dan Probohudono et al. (2013b) senilai 28,61%. *Risk disclosures* selama Era Roadmap keuangan berkelanjutan berkisar antara 22,47% sampai dengan 64,07%. Mekanisme *corporate governance* yang diproksikan dengan jumlah komisaris berkisar antara 2 orang sampai dengan 10 orang dalam keanggotaan dewan, sedangkan jumlah komisaris independen berkisar antara 2 orang sampai dengan 6 orang. Berikutnya jumlah

komite audit berkisar antara 3 sampai dengan 7 orang. Rata-rata frekuensi rapat dewan komisaris adalah 31, sedangkan frekuensi rapat komite audit adalah sejumlah 23 dalam setiap periode.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	RDI	KOM	KIND	RKOM	KAUDIT	RKAU
Mean	46.77348	5.272727	4.030303	30.40909	4.545455	23.43939
Median	47.05000	5.000000	4.000000	31.00000	4.000000	23.00000
Maximum	64.07000	10.00000	6.000000	47.00000	7.000000	27.00000
Minimum	22.47000	2.000000	2.000000	21.00000	3.000000	21.00000
Observasi	66	66	66	66	66	66

Ringkasan hasil pengujian regresi linier berganda disajikan pada tabel 4. Hasil pengujian signifikansi model (uji F) pada tabel 4 menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000 < α=5% dengan nilai T test (*T Statistic*) sebesar 10,423. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa model layak digunakan untuk melakukan prediksi. Koefisien determinasi (R^2) untuk menggambarkan proporsi variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,465 (46,5%) artinya variabel *risk disclosures* dapat dijelaskan sebesar 46,5% oleh variabel independen dalam model, sedangkan 53,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi

	CE			FE			RE		
	coefficient	t-statistic	Prob	coefficient	t-statistic	Prob	coefficient	t-statistic	Prob
C	-30.245	-1.778	0.080	-47.237	-1.824	0.074	-63.095	-4.420	0.000
KOM	1.074	1.208	0.232	-0.633	-0.403	0.688	0.336	0.370	0.712
KOMIND	-2.082	-1.175	0.245	-0.368	-0.080	0.937	-1.337	-0.684	0.496
RKOM	0.661	3.048	0.003*	1.412	2.915	0.005*	0.785	3.240	0.002*
KAU	2.732	2.628	0.011*	-5.133	-0.795	0.430*	3.001	2.070	0.042*
RKAU	2.015	2.754	0.007*	3.379	5.646	0.000*	3.241	5.878	0.000*
R-squared		0,465			0,801			0.506	
Adjusted R-squared		0,420			0,741			0,465	
S.E. of regression		8,674			5,795			6.338	
F-statistic		10,423			13,416			12.314	
Prob(F-statistic)		0,000			0,000			0.000	

*Signifikan pada α= 5%

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parameter individual dengan uji t pada tabel 4 menunjukkan bahwa jumlah komisaris bank devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap *risk disclosures* dalam era roadmap keuangan berkelanjutan, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih besar dari α=5%. Hal ini berarti hipotesis pertama (H_1) ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa bahwa keberadaan jumlah komisaris untuk memastikan pengelolaan korporasi belum sejalan dengan kepentingan *shareholders*. Dengan demikian hasil studi ini tidak mendukung penelitian sebelumnya (Achmad, 2012; Kurniawanto et al., 2017; Suhardjanto & Dewi, 2011). Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Mazaya & Fuad (2018), Mokhtar & Mellett (2013) serta Setiawan & Andriyanto (2019). Namun demikian, hasil studi ini mendukung penelitian

Elzahar & Hussainey (2012). Walaupun jumlah komisaris yang banyak memunculkan peluang untuk lebih banyak waktu dalam pengawasan serta lebih efektif dalam pengendalian manajemen (Moumen et al., 2016), dan kesadaran dalam *risk disclosures* (Mokhtar & Mellett, 2013), namun tidak menjamin keefektifan dalam mengawasi *risk disclosures* pada pelaporan bank devisa dalam era *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parameter individual dengan uji t menunjukkan bahwa variabel independen ukuran komisaris independen memiliki nilai sig. 0,496> nilai alpha 0,05 dengan nilai koefisien regresi -1,337. Hasil uji ini menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen bank devisa tidak berpengaruh signifikan terhadap *risk disclosures*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) tidak dapat didukung. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi Agency Theory (Jensen & Meckling, 1976) yang mengargumentasikan bahwa keberadaan komisaris independen tidak menjustifikasi *pengurangan agency cost* antara manajemen dan shareholders melalui *risk disclosures* dalam pelaporan perusahaan. Berdasarkan hasil statistik deskriptif pada Tabel 3 menunjukkan paling sedikit komisaris independen berjumlah 2 orang, sedangkan paling banyak 6. Dengan jumlah tersebut, seyogyanya jumlah komisaris independen lebih diperbanyak lagi sehingga dapat lebih intensif dalam pengawasan korporasi. Temuan studi penelitian ini mengindikasikan independensi dari komisaris independen belum menjamin tercakupnya *risk disclosures* dalam *annual report* bank devisa. Seyogyanya, pengawasan yang dilakukan terhadap manajemen akan lebih intensif apabila jumlah komisaris independen yang banyak (Yulianto, 2017). Hasil studi penelitian ini mendukung studi penelitian sebelumnya (Barakat & Hussainey, 2013: Abraham & Cox, 2007; Salem et al., 2019, Muslih & Mulyaningtyas, 2019). Namun demikian hasil ini tidak mendukung hasil kajian penelitian Falendro et al. (2018). Temuan ini mengindikasikan bahwa komisaris independen belum optimal memenuhi tanggungjawabnya khususnya pengawasan korporasi. Hasil uji t tentang pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap *risk disclosure* menunjukkan pengaruh signifikan positif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa banyaknya jumlah rapat dewan komisaris menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap *corporate governance*, termasuk *risk disclosures*. Dengan demikian hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga (H_3). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Suhardjanto & Dewi (2011), Suharjanto et al. (2012) dan Ettredge et al. (2011), bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *risk disclosures.*

Dalam konteks komite audit, berdasarkan hasil statistik uji t menunjukkan bahwa variabel bebas ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap *risk disclosures*. Dengan demikian hasil penelitian ini mendukung hipotesis keempat (H_4) dan kelima (H_5). Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil studi Falendro et al. (2018), yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *risk disclosure*, akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa komite audit berperan sepenuhnya dalam memastikan hal-hal yang diperlukan *stakeholder* dan *shareholders.* Temuan studi ini mengindikasikan bahwa komite audit berupaya memenuhi tanggungjawabnya khususnya *risk dislosures* dalam pelaporan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung studi Ettredge et al. (2011), bahwa komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap *risk disclosures*.

Konsep *corporate governance* dikembangkan untuk melindungi kepentingan investor dan tanggungjawabnya dalam proses *financial reporting* (Kayati et al., 2019). Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yakni keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran di dalam perusahaan dapat mengatasi dan meminimalkan berbagai macam konflik kepentingan (Susilawati, 2019). Mekanisme *corporate governance* melalui dewan komisaris, komisaris independen, rapat dewan komisaris, komite audit dan rapat komite audit sebagai wujud bentuk pengawasan dalam perusahaan, diantaranya berkenaan informasi akuntansi yang terdapat dalam *annual report.*

Informasi akuntansi yang saat ini dikeluarkan oleh perusahaan tidak sepenuhnya memadai ketika digunakan untuk tujuan membuat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tambahan tentang risiko diperlukan untuk pendeteksian ketidakpastian. Kurangnya informasi mengenai risiko yang dihadapi perusahaan merupakan salah satu kelemahan utama dalam informasi akuntansi yang diungkapkan oleh perusahaan. Saat ini, perusahaan wajib mengeluarkan beberapa item informasi semacam ini (Cabedo & Tirado, 2004). Melalui *risk disclosues* dalam pelaporan, terlihat banyak hal yang mungkin dapat diantisipasi perusahaan (Patelli & Prencipe, 2007). Oleh karena memiliki *duality perspectives of risk*, maka *stakeholder* perlu informasi lebih lanjut tentang *risk disclosures* dalam membuat suatu keputusan serta dapat memahami posisi perusahaan (Probohudono et al., 2013a). Hasil studi Abraham & Shrives (2014) menunjukkan bahwa manajer perusahaan lebih memilih memberikan *disclosures* yang simbolis daripada substantif. Hasil penelitian mengindikasikan perusahaan lebih menekankan pada substantif *risk disclosures.*

Dalam melaksanakan *risk management* yang optimal, sebagai perusahaan dalam sektor keuangan, diperlukan pengelolaan *risk disclosures* yang tetap berpegang teguh pada standar kode etik perbankan melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) guna memenuhi kebutuhan tidak hanya nasabah namun juga *stakeholders* demi bisnis yang berkelanjutan (Dosinta, 2020). Bank umum yang berstatus devisa sebagai perusahaan dalam sektor keuangan memiliki produk yang lebih luas, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing atau jasa bank ke luar negeri (IDX Channel, 2021). Oleh karena itu, bank devisa tidak terlepas dari RAKB yang telah disusun oleh OJK. Saat ini, ada banyak perusahaan yang secara sukarela mengadopsi dan menerapkan praktik keberlanjutan secara luas untuk memenuhi permintaan dan ekspektasi *stakeholders* (Handajani et al., 2021). Dengan demikian "*Sustainable Finance to Support Sustainable Development Goals*" untuk mengarahkan program sektor keuangan yang berkelanjutan (*sustainable finance*) menjadi solusi mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Di sektor keuangan seperti perbankan, tekanan global mendorong bank untuk lebih aktif dalam keberlanjutan usaha, seperti dari aspek ekonomi, lingkungan dan sosial (Handajani et al., 2021). Kemampuan perusahaan untuk menampung *profit* yang besar juga mencerminkan besarnya kemampuan perusahaan untuk mendistribusikan *profit* tersebut sesuai ekosistem alamnya (Winarno & Sawarjuwono, 2021), karena keberadaan suatu perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Trireksani & Djajadikerta, 2016). Walaupun perbankan bergerak dalam sektor jasa keuangan, namun diharapkan dapat mengimplementasikan *green*

accounting. Implementasi *green accounting* merupakan salah satu solusi dalam mendorong kemampuan perusahaan untuk meminimalkan masalah lingkungan yang dihadapi (Fatwadi et al., 2016), seperti secara kontinu mereview kredit yang berdampak lingkungan. Praktik bank ramah lingkungan untuk meminimalkan risiko bisnis dengan mengurangi risiko lingkungan dan sosial dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan (Handajani et al., 2019).

Bank yang ramah lingkungan tidak hanya menaikkan standarnya sendiri tetapi juga dapat mempengaruhi perilaku pelaku usaha lain untuk bertanggung jawab secara sosial (Handajani, 2019). Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Nugraheni et al. (2020) tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil kajian Shabestari et al. (2020) menunjukkan bahwa dengan adanya *risk disclosures* dalam pelaporan, menunjukkan kesiapan sektor perbankan di Amerika Utara dalam menghadapi krisis tahun 2008-2009. Dengan hasil tersebut, dapat diargumentasikan sejalan dengan *agency theory* bahwa peningkatan *disclosures* dapat mengurangi asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976) serta mampu menjelaskan alasan mengapa perusahaan secara sukarela (*voluntary*) melakukan *risk disclosures* dalam pelaporannya (Elshandidy & Neri, 2015). Hal ini sejalan dengan argumentasi dalam studi Dosinta & Brata (2020) bahwa *shareholders* dan *stakeholders* selayaknya menginginkan untuk bertahan dalam kelangsungan perusahaan yang salah satu upayanya dilakukan dengan memprioritaskan keberlanjutan.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Temuan studi penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit dan frekuensi rapat komite audit sebagai proksi dari mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *risk disclosures*. Namun demikian, ukuran dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *risk disclosures*. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mekanisme *corporate governance* harus tetap bersinergi mengintensifkan pengawasan dalam upaya mewujudkan keberlanjutan bank devisa dalam era Roadmap Keuangan Berkelanjutan serta mendukung Pemerintah dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. *Content analysis* memiliki keterbatasan karena adanya subjektivitas, khususnya berkenaan dengan kodifikasi *risk disclosures* serta dimungkinkan belum mewakili semua aspek yang berkaitan dengan mekanisme *corporate governance*. Penelitian ini hanya mengukur kuantitas, bukan kualitas dari *risk disclosures*. Studi mendatang direkomendasikan melakukan kodifikasi *risk disclosures* untuk menginvestigasi kualitas dari *risk disclosures.*

Daftar Pustaka

Abraham, S., & Cox, P. (2007). Analyzing the determinants of narrative risk information in UK FTSE 100 annual reports. *British Accounting Review, 39*(3), 227–248. https://doi.org/10.1016/j.bar.2007.06.002

Abraham, S., & Shrives, P. J. (2014). Improving the relevance of risk factor disclosure in corporate annual reports. *British Accounting Review, 46*(1), 91–107. https://doi.org/10.1016/j.bar.2013.10.002

Achmad, T. (2012). Dewan Komisaris Dan Transparansi: Teori Keagenan Atau Teori Stewardship? *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 16*(1), 1–12.

Ali, M. M., Bakar, R. A., & Ghani, E. K. (2018). The Effect of Firm Internal and External Characteristics on Risk Reporting Practices among Malaysian Listed Firms. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management, 2*(2), 107. https://doi.org/10.28992/ijsam.v2i2.53

Andarini, P., & Januarti, I. (2012). Hubungan Karakteristik Dewan Komisaris dan Perusahaan Terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko Pada Perusahaan Go Public Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 9*(1), 83–99.

Barakat, A., & Hussainey, K. (2013). Bank Governance, Regulation, Supervision, and Risk Reporting: Evidence from Operational Risk Disclosures in European banks. *International Review of Financial Analysis, 30*, 254–273. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.002

Beasley, M. S., Carcello, J. V, Hermanson, D. R., & Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and Corporate Governance Mechanisms. *Accounting Horizons, 14*(4), 441–454.

Bennet, B. (2013). Evidence on the Determinants and Implications of the Mix of Director Monitoring and Advising. SSRN Papers. https://doi.org/10,2139/ssrn.2218773

Botosan, C. A. (1997). Disclosure Level and the Cost of Equity Capital. *Accounting Review, 72*(3), 323–349.

Buckby, S., Gallery, G., & Ma, J. (2017). An analysis of risk management disclosures: Australian evidence. *Managerial Auditing Journal, 30*(8/9), 812–869. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1108/MAJ-09-2013-0934

Cabedo, J. D., & Tirado, J. M. (2004). The Disclosure of Risk in Financial Statement. *Accounting Forum, 28*(2), 181–200. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2003.10.002

Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Empat.

Collier, P., & Gregory, A. (1999). Audit committee activity and agency costs. *Journal of Accounting and Public Policy, 18*(4–5), 311–332.

Ditta, A. S. A., & Setiawan, D. (2019). Corporate governance in Indonesia: One decade perspective. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 23*(1), 61–77. https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i1.2182

Dosinta, N. F. (2020). Risk Disclosures pada Pelaporan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8*(3), 595–610. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.25105

Dosinta, N. F., & Brata, H. (2020). Politik Penamaan di Dalam Pelaporan Korporat Pasca implementasi Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11*(1), 138–158. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.09

Egbunike, F. C., Gunardi, A., Ugochukwu, U., & Hermawan, A. (2021). Internal Corporate Governance Mechanisms and Corporate Tax Avoidance in Nigeria: A Quantile Regression Approach. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 16*(1), 20. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p02

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. *Academy of Management Review, 14*(1), 57–74.

Elshandidy, T., & Neri, L. (2015). Corporate Governance, Risk Disclosure Practices, and Market Liquidity: Comparative Evidence from the UK and Italy. *Corporate Governance: An International Review, 23*(4), 331–356. https://doi.org/10.1111/corg.12095

Elshandidy, T., Shrives, P. J., Bamber, M., & Abraham, S. (2018). Risk reporting: A review of the literature and implications for future research. *Journal of Accounting Literature, 40*(December 2017), 54–82. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2017.12.001

Elzahar, H., & Hussainey, K. (2012). Determinants of Narrative Risk Disclosures in UK Interim Reports. *Journal of Risk Finance, 13*(2), 133–147. https://doi.org/10.1108/15265941211203189

Ettredge, M., Johnstone, K., Stone, M., & Wang, Q. (2011). The Effects of Firm Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies, 16*(4), 866–889. https://doi.org/10.1007/s11142-011-9153-8

Falendro, A., Faisal, F., & Ghozali, I. (2018). Karakteristik Dewan Komisaris, Komite Dan Pengungkapan Risiko Perusahaan. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan, 8*(2), 115. https://doi.org/10.22219/jrak.v8i2.31

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics, XXVI* (2), 301–325.

Fatwadi, F., Handajani, L., & Fitriah, N. (2016). Voluntary Report Berbasis Green Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 7*(3), 370–387. https://doi.org/10.18202/jamal.2016.12.7027

Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis, 6*(2), 121–136. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243

Handajani, L., Akram, A., & Rifai, A. (2021). Sustainable Banking and Bank Performance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 16*(1), 173–186. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p12

Handajani, L., Rifai, A., & Husnan, L. H. (2019). Kajian Tentang Inisiasi Praktik Green Banking Pada Bank BUMN. *Jurnal Economia, 15*(1), 1–16. https://doi.org/https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.21954

IAI. (2018). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per Efektif 1 Januari 2018. Divisi Penerbitan IAI.

Ibrahim, A., Habbash, M., & Hussainey, K. (2019). Corporate Governance and Risk Disclosure: Evidence from Saudi Arabia. *International Journal Accounting, Auditing and Performance Evaluation, 15*(1), 89–111. https://doi.org/10.1504/IJAAPE.2019.096748

IDX Channel. (2021). Sudah Tahu Apa Itu Bank Devisa? Berikut Penjelasannya. https://www.idxchannel.com/banking/sudah-tahu-apa-itu-bank-devisa-berikut-penjelasannya

Istorini, L. T., & Handoyo, S. (2014). Karakteristik Dewan Komisaris, Karakteristik Perusahaan, Dan Keberadaan Risk Management Committee. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 18*(2), 201–214.

Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *The Journal of Finance, 48*, 831–880.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firms: Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360.

Kayati, K., Astuti, A. D., & Yulianto, A. (2019). Peran Mekanisme Corporate Governance dalam Penentuan Leverage Perusahaan Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi, 3*(2), 150. https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.2561

Klein, A. (2002). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of Accounting and Economics, 33*(3), 375–400.

Kurniawanto, H., Suhardjanto, D., & Agustiningsih, W. (2017). Corporate Governance and Corporate Risk Disclosure: Empirical Evidence of Non-Financial Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *Review of Integrative Business and Economics Research, 6*(4), 255–270.

Lobo, G. J. (2017). Accounting research in banking – A review. *China Journal of Accounting Research, 10*(1), 1–7. https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.09.003

Lutfi, L., Silvy, M., & Iramani, R. (2014). The Role of Board of Commissioners and Transparency in Improving Bank Operational Efficiency and Profitability. *Journal of Economics, Business, & Accountancy Ventura, 17*(1), 81. https://doi.org/10.14414/jebav.v17i1.268

Mazaya, N., & Fuad, F. (2018). Business Strategy, Corporate Governance, Firm Characteristics, and Risk Disclosure in the Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan 22*(3), 381–394. https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2167

Menon, K., & Williams. (1994). The use of audit committees for monitoring. *Journal of Accounting and Public Policy, 13*, 121–139.

Miihkinen, A. (2012). What Drives Quality of Firm Risk Disclosure? The Impact of a National Disclosure Standard and Reporting Incentives under IFRS. *International Journal of Accounting, 47*(4), 437–468. https://doi.org/10.1016/j.intacc.2012.10.005

Mokhtar, E. S., & Mellett, H. (2013). Competition, corporate governance, ownership structure, and risk reporting. *Managerial Auditing Journal, 28*(9), 838–865. https://doi.org/10.1108/MAJ-11-2012-0776

Moumen, N., Ben Othman, H., & Hussainey, K. (2016). Board structure and the informativeness of risk disclosure: Evidence from MENA emerging markets. *Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting*, 35, 82–97. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2016.09.001

Muslih, M., & Mulyaningtyas, C. T. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Risiko. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset), 11*(1), 179–188. https://doi.org/10.17509/jaset.v11i1.17303

Nahar, S., Azim, M. I., & Hossain, M. M. (2020). Risk Disclosure and Risk Governance Characteristics: Evidence from a Developing Economy. *International Journal of Accounting and Information Management, 28*(4), 577–605. https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2019-0083

Neri, L., Elshandidy, T., & Guo, Y. (2018). Determinants and Impacts of Risk Disclosure Quality: Evidence from China. *Journal of Applied Accounting Research, 19*(4), 518–536. https://doi.org/10.1108/JAAR-07-2016-0066

Ntim, C. G., Lindop, S., & Thomas, D. A. (2013). Corporate Governance and Risk Reporting in South Africa: A study of corporate risk disclosures in the Pre-and Post-2007/2008 Global Financial Crisis Periods. *International Review of Financial Analysis, 30*, 363–383. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2013.07.001

Nugraheni, P., Indrasari, A., Hamzah, N., & Maelah, R. (2020). Managing social and environmental activities: toward sustainability of companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 24*(2), 130–138. https://doi.org/10.20885/jaai.vol24.iss2.art6

Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Road Map Keuangan Keberlanjutan. https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Arahkan Industri Jasa Keuangan Dukung Program Sustainable Development Goals (SDGs). https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/SP-Arahkan-IJK-Dukung-Program-Sustainable-Development-Goals/SIARAN PERS SEMINAR SUISTANABLE FINANCE.pdf

Patelli, L., & Prencipe, A. (2007). The Relationship Between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the Presence of a Dominant Shareholder. *European Accounting Review, 16*(1), 5–33. https://doi.org/10.1080/09638180701265820

Probohudono, A. N., Tower, G., & Rusmin, R. (2013a). Diversity in Risk Communication. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 7*(1), 43–58. https://doi.org/10.14453/aabfj.v7i1.4

Probohudono, A. N., Tower, G., & Rusmin, R. (2013b). Risk disclosure during the global financial crisis. *Social Responsibility Journal, 9*(1), 124–136. https://doi.org/10.1108/17471111311307859

Rahayuni, N., Solikhah, B., & Wahyudin, A. (2018). Mampukah Kinerja Keuangan Memediasi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Modal Intelektual? *Jurnal Kajian Akuntansi, 2*(1), 67. https://doi.org/10.33603/jka.v2i1.1243

Sabbaghi, O. (2016). Corporate Governance in China: A Review. Corporate Governance: *The International Journal of Business in Society, 16*(5), 866–882. https://doi.org/10.1108/CG-12-2015-0162

Salem, I. H., Ayadi, S. D., & Hussainey, K. (2019). Corporate governance and risk disclosure quality: Tunisian evidence. *Journal of Accounting in Emerging Economies, 9*(4), 567–602. https://doi.org/10.1108/JAEE-01-2019-0005

Sari, S. P., & Sholihkah, H. (2019). Liquidity Risk Disclosure: A Review of Corporate Governance. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia, 4*(2), 147–155. https://doi.org/https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8723

Setiawan, D., & Andriyanto, E. A. (2019). Apakah Keberadaan Komisaris Keluarga Dan Komisaris Independen Meningkatkan Pengungkapan Risiko? *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis, 14*(1), 1–9. https://doi.org/10.24843/jiab.2019.v14.i01.p01

Solomon, J. F., Solomon, A., Norton, S. D., & Joseph, N. L. (2000). A conceptual framework for corporate risk disclosure emerging from the agenda for corporate governance reform. *British Accounting Review, 32*(4), 447–478. https://doi.org/10.1006/bare.2000.0145

Suhardjanto, D., & Dewi, A. (2011). Pengungkapan Risiko Finansial Dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 15*(1), 105–118.

Suhardjanto, D., Dewi, A., Rahmawati, E., & M, F. (2012). Peran Corporate Governance Dalam Praktik Risk Disclosure Pada Perbankan Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing, 9*, 1–96.

Susilawati. (2019). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Perbankan. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan, 2*(1), 31–46. https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.13

Trireksani, T., & Djajadikerta, H. G. (2016). Corporate governance and environmental disclosure in the Indonesian mining industry. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 10*(1). https://doi.org/10.14453/aabfj.v10i1.3

Vishny, R. W., & Shleifer, A. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance, 52*(2), 737-738.

Wahh, W. B., Khin, E. W. S., & Abdullah, M. (2020). Corporate Risk Disclosure in Emerging Economies: A Systematic Literature Review and Future Directions. *Asian Journal of Accounting Perspectives, 13*(2), 17–39. https://doi.org/10.22452/ajap.vol13no2.2

Winarno, W. A., & Sawarjuwono, T. (2021). Kritik Atas Triple Bottom Line: Perspektif Memayu Hayuning Bawana. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 12*(1), 113–131. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.07

Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 15*(1), 15–26. https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26

Yammeesri, J., & Herath, S. K. (2010). Board Characteristics and Corporate Value: Evidence from Thailand. *Corporate Governance, 10*(3), 279–292. https://doi.org/10.1108/14720701011051910

Yulianto, A. (2017). Peran Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Dalam Keputusan Pendanaan Perusahaan Pertambangan. *Jurnal Kajian Akuntansi, 1*(1), 11–22. https://doi.org/10.33603/jka.v1i1.509

Zhou, H., Owusu-Ansah, S., & Maggina, A. (2018). Board of directors, audit committee, and firm performance: Evidence from Greece. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 31*, 20–36. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2018.03.002

Zulfikar, R., May, N., Suhardjanto, D., & Agustiningsih, S. W. (2017). Independent Commissioner Against Mandatory Disclosure of Financial Performance as a Moderating Variable. *Review of Integrative Business and Economics Research, 6*(3), 205–216.